

WELFARE STATE: LUMPUH SEKALIGUS MELUMPUHKAN

Oleh: Qusthan Abqary H. F¹

Abstract

Welfare state on traditional or modern form still remain some weakness. On traditional form, welfare state's emerge high burden on state budget. On the other hand, modern form of this idea was failure to finishing some classic problem—unemployment and poverty as such. This paper explores some critiques to welfare state ideas. And the most important thing is, welfare state paralysing individual's autonomy for the sake of a reason which embodied as so called commodity: welfare.

Keywords: welfare state, modern, traditional, autonomy.

A. Pendahuluan

Welfare state ramai dibincangkan publik, baik di Eropa maupun di Amerika sejak satu abad silam. Bahkan, di negara-negara seperti Jerman dan Inggris, beberapa partai politik dominan, saling mengklaim bahwa merekalah yang paling kompeten untuk menjalankan program-program *welfare*. Dengan kata lain, isu kesejahteraan (*welfare*) menjadi komoditas politik yang cukup signifikan untuk dijual dan kemudian merebut suara rakyat dalam pemilu. *Welfare state*, dalam tulisan ini dibatasi sebagai:

“concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life” (BSE: 2006).

Adapun karakteristik daripada *welfare state* [tradisional] secara ringkas dapat dilihat melalui 4 faktor, yaitu; (1) jaminan kerja (*full employment*) yang mana, jumlah para penganggur tidak boleh melebihi 3% daripada populasi yang bekerja; (2) jaminan sosial (*social security*) yang memiliki dua karakteristik: keluasan dan universalitas. Jaminan sosial harus mencakup seluruh penduduk dan meluas ke seluruh aspek kehidupan sosial seperti asuransi

¹ Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

kecelakaan, pensiun, dan lain sebagainya; (3) pendidikan publik gratis serta (4) kebijakan sosial redistributif (*social policy understood as redistributory*). Dalam hal ini, *welfare state* harus berupaya untuk meningkatkan level kepuasan dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial (Vidal: 1997; 102).

Tulisan ini berkeinginan untuk (1) mendeskripsikan kritik-kritik yang selama ini ditujukan pada *welfare state*. Dari sini, akan diajukan pendapat bahwasanya (2) *welfare state* melumpuhkan otonomi individu untuk memilih serta menerapkan pilihan-pilihannya, demi sebuah alasan yang mewujudkan sebagai komoditas bernama: kesejahteraan.

B. Kegagalan Welfare State

Sekurang-kurangnya, terdapat tiga interpretasi utama mengenai gagasan *welfare state*, yaitu:

“(1) *the provision of welfare services by the [state](#)*; (2) *an ideal model in which the state assumes primary responsibility for the [welfare](#) of its [citizens](#). This responsibility is comprehensive, because all aspects of welfare are considered; a "safety net" is not enough, nor are minimum standards. It is universal, because it covers every person as a matter of right*; (3) *the provision of welfare in society. In many "welfare states", especially in continental Europe, welfare is not actually provided by the state, but by a combination of independent, voluntary, mutualist and government services. The functional provider of benefits and services may be a [central](#) or [state government](#), a state-sponsored company or agency, a private [corporation](#), a [charity](#) or another form of non-profit organization”* (Wikipedia: 2006).

Welfare state kerap kali mengundang kritik. Keinginan untuk menjamin dan atau menanggung beban (sosial) yang dipanggul individu dalam suatu negara, pada kondisi tertentu, justru memberatkan anggaran negara dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jansen (2006) misalnya, menegaskan bahwa: *welfare state* di Eropa berada dalam bahaya, karena transfer kekayaan (*wealth*) dari individu-individu yang produktif kepada mereka yang tidak atau kurang produktif, menghasilkan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi ekonomi global.

Faktanya, sistem pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi punggawa perekonomian global, memang telah gagal dalam menyelesaikan permasalahan sosial, semisal kemiskinan global. Jika membaca data statistik yang ada, kita tidak dapat mangkir. Mengacu pada laporan New Economic Forum yang dipublikasikan menjelang *World Economic Forum di Davos*, disebutkan bahwasanya konsep pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) telah gagal mereduksi kemiskinan. Antara tahun 1990 hingga 2001, untuk setiap \$100 pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pendapatan tiap orang, hanya \$0,60 yang mengenai sasaran dan memberi kontribusi dalam mengurangi kemiskinan (NEF: 2006). Bagaimana para pendukung gagasan *welfare state* menjawab fakta global seperti ini? Bukankah isu kemiskinan juga menjadi salah satu perhatian dari *welfare state*?

Kembali pada Jansen (2006), ia menyebut bahwa, *welfare state* mengandung beberapa bahaya, di antaranya; (1) seringkali tidak adil, ketika, mengambil hak milik individu melalui pajak yang berlebihan (*excessive taxation*); (2) mengganti putusan kolektif pemerintah demi kebebasan dan putusan individual; (3) mengurangi inisiatif dan *entrepreneurship* individu dalam suatu negara; (4) memperluas kekuasaan pemerintah dan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan korupsi. Hal ini senada dengan Lionel Trilling—seorang pemikir liberal kontemporer berhaluan kiri—yang menyebut bahwasanya:

“Some paradox of our natures leads us, when once we have made our fellow men the objects of our enlightened interest, to go on to make them the object of our pity, then of our wisdom, ultimately of our coercion. It is to prevent this corruption, the most ironic and tragic that man knows, that we stand in need of the moral realism which is the product of the moral imagination” (Himmelfarb: 1991).

Selain itu, bagaimana dengan kreativitas individu? Tidakkah negara turut menghambat berkembangnya kreativitas individu jika ia mengurangi inisiatif dan *entrepreneurship* seseorang? Jawabnya, iya. Kemudian, bukankah ini mengarah pada sentralisasi? Ropke (2006) misalnya, mengafirmasi hal ini. Baginya, sentralisasi —terutama— terjadi dalam aras pengambilan putusan, tanggungjawab, dan menumbuhkan kolektivisasi kesejahteraan individu dan rencana hidup (*design for life*).

Dalam hemat penulis, kolektivisasi kesejahteraan individu, dalam batas-batas tertentu dapat diterima. Namun, tidak disertai dengan hasrat negara untuk mengatur rencana hidup seseorang demi alasan: kesejahteraan individu. Sederhananya, dalam hal ini, negara jangan sampai melakukan intervensi terlalu jauh. Bukankah hal ini bertentangan dengan prinsip: ‘memperlakukan manusia sebagai tujuan’ (*end*) dalam hidupnya? Bagaimana dengan individu-individu yang tidak memposisikan kesejahteraan sebagai tujuan hidupnya? Apakah ia harus mengikuti ‘rencana hidup’ yang telah digagas oleh negara? Begitu pula dengan persoalan tanggungjawab. Bukankah setiap individu (seharusnya) bertanggungjawab penuh atas keberlangsungan hidup masing-masing?

Kritik lain yang “agak” ekstrem datang dari seorang filosof sekaligus novelis yang bernama, Andrew Bernstein(2006). Bernstein membangun argumen yang bertujuan untuk mengeliminasi *welfare state*. Bagi Bernstein, dalam berbagai bentuk, *welfare state* tetaplah tidak adil. Karena individu-individu yang produktif dipaksa untuk membiayai individu-individu yang kurang atau bahkan sama sekali tidak produktif. Padahal, belum tentu, individu yang membiayai orang yang kurang mampu, ialah orang yang paling mampu dalam masyarakat tersebut. Atau justru sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan, orang yang paling mampu dalam suatu masyarakat, justru mendapat jatah kewajiban untuk membantu secara tidak proporsional—di bawah kemampuan yang ia miliki. Terkait dengan fakta kemiskinan, Bernstein tidak menganggapnya sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan (*incurable disease*). Kemiskinan baginya dapat diselesaikan melalui *full-time employment*. Namun dengan catatan, individu yang miskin harus mempunyai keinginan untuk menguji (kembali) dan merubah nilai-nilai destruktif yang menjratnya dalam selubung kemiskinan. Dalam beberapa hal, individu yang miskin harus dapat memahami kodrat keegoisan (*the nature of selfishness*) dan pengaturan pikiran (*the role of the mind*), jika ia ingin sukses dan bahagia. Di sinilah *welfare state* menunjukkan taringnya. Ia berusaha untuk melawan ‘pemahaman’ di atas, sembari terus mempertahankan premis-premis irasionalnya. Bagi Bernstein, tanggungjawab personal dan pewarisan nilai (*value achievement*) ialah bentuk dari kebajikan intelektual (*intellectual virtues*); keduanya menyediakan perencanaan, dan pendidikan. Sementara dalam kerangka *welfare state*, salah satu aspek di atas tidak

sepenuhnya otonom. Maka dapat dipahami mengapa Bernstein menyebut bahwa premis-premis *welfare state* irasional.

Di samping itu, program-program *welfare* kerap kali dituding bersifat satu arah (*one-way*) (Gilman: 2006; Ropke: 2006). Semisal program *Temporary Assistance to Needy Families* (TANF) di Amerika Serikat. Untuk memperoleh *welfare payments* seseorang harus bekerja, untuk menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan mereka (*prescribed*: hal 2) dengan nilai-nilai tertentu dan mereka tidak mendapatkan keuntungan lebih dari lima kali seumur hidupnya (Gilman: 2004; 2). Senada dengan Gilman, bagi Ropke, *welfare state* tidak hanya bergerak satu arah (*one-way*), namun mengandung implikasi lebih jauh lagi. Tanpa perlu diragukan lagi, menurut Ropke, *welfare state* justru mengarah pada situasi di mana, “pusat gravitasi masyarakat tercerabut dari komunitas-komunitas yang sejati ke pusat administrasi impersonal dan organisasi-organisasi massa impersonal yang mengapitnya” (Ropke: 2006). Pada akhirnya, Gilman (2006; 46-7) mengklaim bahwa *welfare state* telah gagal. Bukan karena gagal memenuhi permintaan si miskin, tetapi karena tidak dapat memenuhi permintaan seluruh masyarakat. Kebanyakan orang menggunakan kesejahteraan (*welfare*) sebagai jaringan sosial sementara (*an intermittent safety net*), bukan sebagai cara hidup (*way of life*).

Kemudian, dari sederet kritik kecil di atas, apakah gagasan *welfare state* berhenti sampai di sini? Tentunya tidak. Mari kita lihat lebih lanjut!

C. Modern Welfare State: Koreksi yang Berhasil?

Semenjak kapan gagasan *welfare state* mengalami krisis? Vidal (1997; 103) menunjuk sejak krisis minyak sedunia pada dekade tahun 70an. Tepatnya pada tahun 1973. Pada masa ini, berkembang gagasan neoliberal konservatif. Pertanyaan seputar kesesuaian antara *welfare state* dengan kapitalisme pasar meningkat kembali untuk pertama kali sejak tahun 1930an (Howell: 2006; 1). Selain krisis minyak, beberapa faktor ekonomi lainnya juga ikut mendorong hadirnya beberapa penyesuaian bagi gagasan *welfare state*. Inggris dan Jerman misalnya, mengalami hal ini. Untuk lebih jelasnya, akan lebih baik melihat tabel yang diperoleh dari Kleden (2005; 162) berikut ini.

**Keadaan Ekonomi yang Menyebabkan Perubahan
Welfare State Inggris dan Jerman**

Kondisi Ekonomi	Inggris	Jerman
Krisis minyak 1973 dan 1979	Terjadi krisis moneter yang tidak dapat diatasi dengan ekonomi Keynesian	Dapat melalui krisis pertama dengan baik, tetapi terkena dampak krisis kedua
Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari naiknya harga buruh yang tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas dan pengaruh dari krisis minyak	Apabila antara periode 1967-1973 inflasi hanya mencapai 7,0% pada periode 1973-1980 inflasi menjadi 16%	Pada periode 1967-1973 inflasi sebesar 4,3% dan pada 1973-1980 hanya menjadi 4,8%. Ekonomi Jerman baru sangat terpukul setelah unifikasi 1989
Kebijakan Moneter	Dilakukan oleh Thatcher	Dilakukan oleh Kohl
Pertumbuhan Ekonomi	3,5% pada 1989	4% pada 1989
Privatisasi	British Airways, British Gas, British Rail	Veba, VW, VIAG (dilakukan tahap demi tahap)

Dari beberapa fakta empirik di atas, kita bisa mengatakan bahwasanya, konsep awal mengenai *welfare state* mulai terdesak, tidak hanya oleh kondisi perekonomian global, namun juga oleh munculnya gagasan baru yang bernama neo-liberalisme.

Tudingan bahwa program-program *welfare* memberatkan anggaran negara; melestarikan para pemalas; tidak menekan angka kemiskinan dan sebagainya, secara langsung, juga ikut memaksa para pembela *welfare* (*welfare advocat*) untuk merevisi gagasan-gagasan mengenai *welfare state*. Contohnya, melakukan reformasi pendanaan sosial yang selama ini dijalankan. Yaitu dengan melakukan beberapa hal berikut: (1) mengganti pinjaman (*loans*) dengan *life-event grants*. Karena sistem pinjaman yang selama ini digunakan justru menjebak masyarakat pada selubung kemiskinan; (2) dibutuhkan sebuah pendekatan baru dalam menyediakan bantuan finansial bagi anak-anak muda yang hidup di keluarga berpendapatan rendah. Karena sistem pembayaran yang selama ini digunakan menyulitkan anak-anak muda tersebut beserta orang

tuanya (LNPFCD: 2006; 1). Kedua hal di atas ialah sebagian dari revisi, sebut dengan nama: *modern welfare state*.

Banyak orang yang mempersepsikan bahwasanya *modern welfare state* ialah sebuah jawaban atas disintegrasi komunitas-komunitas sejati (*genuine communities*) selama kurang lebih seratus tahun terakhir. Namun bagi Ropke, ini ialah jawaban yang salah. Ropke sudah menyadari hal ini sejak ia mengkritisi *Beveridge Plan*. Jangankan mengobati penyakit peradaban kita, *welfare state* justru mengurangi gejala-gejala penyakit sosial dari kondisi yang semakin memburuk, namun pada akhirnya justru tidak dapat disembuhkan. Bahkan, lebih lanjut ia menegaskan bahwa *modern welfare state* mengandung paradok.

“The paradox is that today the modern welfare state carries to an excess the system of government-organized mass relief precisely at a moment when the economically advanced countries have largely emerged from that transition period and when, therefore, the potentialities of voluntary self-help by the individual or group are greatly enhanced” (Ropke: 2006).

Meski sudah melakukan tambal-sulam, tetap saja *modern welfare state* menyisakan celah bagi hadirnya kritik. Persoalan tanggungjawab personal umpamanya, tetap dipermasalahkan (Bernstein: 2006). Tidak hanya Bernstein, Arneson (2000; 10), ikut mempermasalahkan ihwal kebijakan-kebijakan *welfare state* yang mengecualikan tanggungjawab personal sebagai konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan personal dan justru mendegradasi rasa hormat kepada si miskin, yang lebih diperlakukan sebagai korban-korban tak berdaya ketimbang sebagai agen yang bertanggungjawab atas dirinya masing-masing.

Di samping persoalan penghormatan kepada si miskin, isu kemiskinan tentunya juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari perbedaan atau —barangkali lebih tepat untuk menyebutnya sebagai— ketimpangan akses dan kepemilikan atas barang-barang sosial utama (*social primary goods*). Jika demikian, meminjam *point of view* Kaum Liberal, pertanyaan yang dapat kita ajukan di sini kepada para pendukung *welfare state* ialah: “Bagaimana jika ketimpangan tersebut didapatkan (*earned*) dan diakui sebagai hak yang semestinya diterima (*deserved*) oleh individu-individu, yaitu jika ini adalah hasil tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan individu itu sendiri?” (Kymlicka: 2004; 75). Tentunya sangat naif untuk mengatakan bahwasanya terdapat orang-orang yang memilih untuk

hidup miskin tanpa alasan yang meyakinkan atau barangkali alasan yang lebih baik. Namun secara sederhana kita dapat dengan lugas mengatakan bahwasanya seseorang harus menerima konsekuensi dari tindakan dan pilihan yang dilakukannya secara sadar dan otonom. Lantas, apakah dapat diterima secara moral, jika negara dalam hal ini tetap bersikeras untuk mengintervensi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh masing-masing individu? Sebagian Kaum Liberal tentunya akan menjawab tidak. Pertanyaan *a la liberal* seperti ini memang tepat diajukan, namun tidak menyelesaikan persoalan.

Bagaimana dengan Kubu Marxis? Erik Olin Wright, sosiolog di University of Wisconsin yang konsen pada isu-isu marxisme, sosialisme, kelas dan kapitalisme menyebut bahwasanya pada akhir dekade 1960 hingga awal 1970, terdapat konsensus di antara para Marxis, yaitu: fungsi mendasar dari *welfare state* ialah mereproduksi dan memperkuat dominasi borjuis. Dengan kata lain, telah muncul sebetulnya curiga dari para Marxis mengenai kodrat dari *welfare state*. Hal ini tidak lepas dari realitas obyektif terjadinya; kooptasi kelas pekerja; fragmentasi atas kelas-kelas subordinat; serta menyubsidi biaya reproduksi kapital (Wright: 2003; 22). Hal ini mudah dipahami. *Welfare state* dengan kapitalisme bahu-membahu untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Hingga kini, hadirnya jaminan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pelbagai atribut yang berada di dalam gerbong *welfare state*, dapat diibaratkan layaknya “rem” bagi kencangnya laju “gas” ketimpangan bernama kapitalisme. Keduanya saling mengontrol dan mengingatkan.

Dilihat sekilas, argumen Wright memang terkesan hiperbolistik, namun ada benarnya. Bahkan dalam hemat penulis, justru *kerja* sebagai nilai esensial dari setiap manusia, menjadi unsur yang paling relevan untuk dilontarkan kepada para *welfare advocate*. Bagi para penganggur, kewajiban moral untuk bekerja tentunya menjadi tamparan yang sangat keras. Akan tetapi, bukankah kerja tidak melulu sebatas pada aktivitas formal di perkantoran atau di lapangan? Bukankah segala aktivitas manusia yang menghasilkan adalah kerja? Bagi penulis, jawabnya “ya”. Termasuk di antaranya aktivitas komunikasi antar sesama manusia. Mengapa demikian? Karena komunikasi juga menghasilkan sesuatu bagi seseorang, salah satu di antaranya berupa kepuasan batin. Sementara bagi si cacat, urgensi kerja tentunya menjadi *elan*

vital bagi semangat hidupnya untuk terus berkarya. Tepat pada titik ini, asumsi marxis mengenai kerja menjadi relevan untuk dikemukakan ketimbang pertanyaan *a la* liberal sebelumnya. Bagi penulis, yang terpenting ialah membangkitkan kesadaran bagi para penganggur dan si miskin untuk terus menghasilkan atau produktif dalam keseharian hidupnya. Tentunya dengan tidak melulu menggantungkan nasibnya pada belas kasihan orang lain atau sekedar menuntut tanggungjawab negara atas fakir miskin dan anak terlantar. Sedangkan program-program *welfare state* kerap kali melumpuhkan otonomi individu untuk menentukan pilihannya, sehingga mereka cenderung untuk tidak mandiri.

Pertanyaan yang bisa dilontarkan untuk didiskusikan lebih lanjut ialah, bagaimana para *welfare advocate* menanggapi kritik-kritik di atas? Kemudian, bagaimanakah rumusan penyesuaian yang sesuai apabila gagasan *welfare state* diadopsi di Indonesia?

Wahyudi (2005: 1-2) memberikan jawaban yang cukup menarik. Ia mengedepankan pentingnya mempertimbangkan *welfare state* sebagai pilihan kebijakan, meskipun dalam prosesnya perlu penyesuaian dengan konteks dan tantangan khas di Indonesia. Lebih lanjut, *strong state* direkomendasikannya sebagai modifikasi. Yang terakhir ini didefinisikan sebagai: “Negara yang memiliki pemihakan jelas kepada mereka yang lemah dan tidak beruntung, memberi penghormatan atas hak-hak sipil dan politik warga negara, dan kemungkinan besar juga tetap ramah pada pasar” (Wahyudi; 2005: 11). Secara normatif, gagasan ini menarik dan bukan barang baru. *Traditional/Modern welfare state* sedari awal memang menyarankan pemihakan kepada mereka yang lemah dan tidak beruntung, penghormatan atas hak-hak politik dan warga negara, serta kemungkinan ramah pada pasar. Akan tetapi kenyataan berbicara lain. Pasar pada era kontemporer justru sangat sulit untuk diharapkan ramah pada institusi negara—dan masyarakat tentunya. Terlebih sebaliknya, ketika kita berharap institusi negara akan ramah terhadap pasar, (Pelaku) pasar kerap kali berupaya menyubordinasikan peran negara, sementara di sisi lain, negara terus-menerus memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi (pelaku) pasar.

Hal ini terlihat jelas dari kondisi pada era sekarang. Pasar juga selalu berupaya untuk menyudutkan peran negara, sementara negara selalu ditekan untuk selalu meminimalisasi perannya. Gagasan neo-liberalisme tentunya mengafirmasi asumsi di atas.

Herry-Priyono (2006; 8) ketika menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki dengan sangat gamblang menjelaskan bagaimana neo-liberalisme berupaya untuk merentangkan prinsip pasar ke seluruh relasi kehidupan. Sehingga, pasar pada masa sekarang, dan ke depan tentunya, akan lebih jauh berupaya merentangkan prinsipnya ke seluruh lini kehidupan manusia. Lantas pertanyaannya, apakah masih layak kita menaruh kepercayaan yang begitu besar bagi institusi negara untuk terus berupaya “ramah” terhadap pasar? Bagi Saya sudah tidak layak, namun juga tidak berarti kita harus mengabaikannya.

Tak hanya pada dataran abstrak, secara empirik, aplikasi ide *welfare state* juga gagal. Iversen (2006; 5) misalnya menyebut: “*Standard approaches to the welfare state fail to account for the relationship between production and social protection, and they leave behind a number of key questions that any political economy approach to social protection needs to answer*”.

Untuk mengakhiri uraian sederhana ini, barangkali ada benarnya pendefinisian seorang rekan libertarian seperti Narveson (2006; 52), bahwasanya *welfare state* hanyalah “*government [who] claims the right to tax people and redirect their money toward the goal of increasing the welfare of its citizens*”.

D. Penutup

Isu kesejahteraan memang sangat menarik dan bahkan cenderung menyihir. Menarik tentunya bagi kaum miskin untuk menuntut peran negara agar bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negaranya, serta menyihir bagi para pengangguran dan orang-orang yang secara alamiah kurang beruntung, semisal terlahir cacat; tetapi, hal itu tidak bisa ditelan mentah-mentah.

Mengacu pada batasan awal bahwasanya *welfare state* ialah konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduknya; serta mengingat beberapa modifikasi yang telah dilakukannya karena beberapa faktor yang bermunculan pada dekade 1970an, maka, kritik sederhana yang dibangun dalam tulisan ini adalah bahwa gagasan *welfare state* melumpuhkan otonomi individu untuk memilih dan menerapkan pilihannya demi sebuah komoditas bernama: kesejahteraan.

Kesejahteraan bukan satu-satunya komoditas yang paling berharga dan bermakna dalam hidup, sehingga ia harus rela begitu

saja menggadaikan pilihan-pilihannya pada program-program *welfare state*? Saya kira tidak. Yang terpenting ialah menumbuhkan kesadaran bagi tiap-tiap individu untuk terus produktif dan mandiri guna mempertahankan hidupnya. Dengan demikian, diharapkan orang-orang dalam usia kerja yang lemah secara sosial maupun natural, tidak terus-menerus menggantungkan hidupnya pada institusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arneson, Richard J. "Economic Analysis Meets Distributive Justice", *Social Theory and Practice*, 26, No. 2, 2000.
- Bernstein, Andrew. *The Welfare State Versus Values and the Mind*, dalam http://www.andrewbernstein.net/articles/7_welfarestate.htm diakses pada 1 Maret 2006.
- BSE (Britannica Student Encyclopedia) diperoleh melalui <http://www.britannica.com/ebi/article-9277699> diakses pada 21 Mei 2006.
- Gilman, Michele Estrin. *Communitarianism and Social Welfare*, 2004, diperoleh melalui <http://www.aals.org/clinical2004/Gilman.pdf#search='michael%20sandel%3B%20communitarianism%3B%20welfare%20state> diakses pada 1 Maret 2006.
- Herry-Priyono, B., **Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan**, Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki, 10 November 2006, tidak diterbitkan.
- Himmelfarb, Gertrude. , 1991, **Poverty and Compassion**. Knopf Publisher.
- Howell, Chris. *The Transformation of the Welfare State*, 2004, diperoleh melalui <http://www.oberlin.edu/politics/howell/Politics%20317%20Syllabus%202004.pdf> diakses pada 21 Mei 2006.
- Iversen, Torben. , 2005, **Capitalism, Democracy, and Welfare**, Cambridge: Cambridge University Press.

- Jansen, G. Richard. *Socialism and The Welfare State*, dalam <http://lamar.colostate.edu/~grjan/socialismprimer.html> diakses pada 1 Maret 2006.
- Kleden, Paskal. , 2005, **Menuju Tengah Baru: Labour Party Inggris dan SPD Jerman di Bawah Tekanan Neoliberalisme**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kymlicka, Will., 2004 **Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan**, terjemahan: Agus Wahyudi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- LNPFCD (Labour National Policy Forum Consultation Document). *A Modern Welfare State*, dalam <http://www.lga.gov.uk/Documents/Labourgroupp/PDFLink/consultationDocs/npf%20-%20welfare%20state.pdf> diakses pada 1 Maret 2006.
- Narveson, Jan. *You and The State: A Fairly Brief Introduction to Political Philosophy*, typescript, 2006.
- Ropke, Wilhelm. "Crisis of the Modern Welfare State", *Joint Economic Committee Economic Classics*, Juli, 1994, diperoleh melalui <http://www.house.gov/jec/classics/ropke.htm>., diakses pada 1 Maret 2006.
- Vidal, Marciano. "The Free Market Economy and the Crisis of the Welfare State", *Concilium*, 1997/2.
- Wahyudi, Agus., 2005, "Membangun 'Negara Sejahtera' dan Memperkuat Peran Negara", dalam **Bulaksumur Menggagas Negara Sejahtera**, Badan Penerbitan Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Wikipedia. **Welfare State**, diperoleh dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state diakses pada 16 Mei 2006.
- Wright, Erik Olin., 2003, **Sociology 621. Class, State and Ideology: An Introduction to Social Science in the Marxist Tradition**, Fall Semester.